



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia menyangkut hajat hidup orang banyak harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana pola hidup bersih dan sehat harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala ditingkat masyarakat sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Sawahlunto 2015 - 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

- 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal Access tahun 2019;
3. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindungi yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi serta air hujan;
4. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase;
5. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
6. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos;

7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung;
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta;
10. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);
11. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di sektor sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan;
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi;
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
25. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
26. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
28. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD-AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 dalam mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi layak serta menjadi dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kota Sawahlunto sampai dengan 2018.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 ditindaklanjuti melalui RKPD, Renja SKPD, APBD yang dapat dilakukan melalui integrasi program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dengan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Sumber biaya pelaksanaan RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 terbuka bagi pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian program kegiatan tahunan RAD AMPL harus mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran tersebut harus dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berikutnya.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan AMPL tahun berikutnya;
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target rencana, harus dilakukan perbaikan seperlunya;
- (5) Kepala SKPD melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua Pokja AMPL.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya;
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kota Sawahlunto 2015-2019 sebagai Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 September 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Seokarno-Hatta Telp./Fax (0754) 61062/61011 Kode Pos 27424

Home Page : <http://www.sawahluntokota.go.id>

e-mail : informasi@sawahlunto.go.id

RENCANA AKSI DAERAH

AIR MINUM DAN PENYERAHAN LINGKUNGAN (AMPL)



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA SAMBUTAN | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.1.1. Maksud dan Tujuan | I-2 |
| 1.1.2. Ruang Lingkup | I-3 |
| 1.1.3. Sistematika Penulisan..... | I-3 |
| 1.2. Kondisi Umum Kota Sawahlunto | I-5 |
| 1.2.1. Batas Administrasi | I-5 |
| 1.2.2. Topografi..... | I-8 |
| 1.2.3. Geohidrologis | I-10 |
| 1.2.4. Demografi..... | I-13 |
| 1.3. Kondisi Umum Pembangunan Daerah | I-16 |
| 1.3.1. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi | I-17 |
| 1.4. Permasalahan dan Tantangan..... | I-25 |
| BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN | |
| TARGET 100-0-100 UNIVERSAL ACCESS..... | 2-1 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran | 2-1 |
| 2.1.1. Air Bersih | 2-1 |
| 2.1.2. Sanitasi..... | 2-2 |
| 2.1.3. Kawasan Kumuh | 2-6 |
| 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi | 2-12 |
| 2.2.1. Arah Kebijakan | 2-12 |
| 2.2.2. Strategi | 2-12 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019..... | 3-1 |
| 3.1. Program dan Kegiatan..... | 3-1 |
| BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI | 4-1 |
| 3.1. Pemantauan dan Evaluasi..... | 4-1 |
| 3.2. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi | 4-2 |
| 3.3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi | 4-2 |
| BAB V PENUTUP..... | 5-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|------|
| Tabel 1.1 | Jumlah RT,RW,Dusun dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan | 1-5 |
| Tabel 1.2 | Luas dan Tingkat Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto..... | 1-8 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto per Kecamatan | 1-13 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013 | 1-14 |
| Tabel 1.5 | Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2013-2014 | 1-18 |
| Tabel 1.6 | Jumlah Rumah (Fisik), Sambungan Rumah PDAM Kota Sawahlunto 2013-2014..... | 1-19 |
| Tabel 1.7 | Data Lokasi, Jumlah Penduduk dan Penduduk Terlayani Sistem Perpipaan Non PDAM PAMSIMAS 2008-2014 | 1-21 |
| Tabel 1.8 | Penyediaan Air Minum Non Perpipaan Kota Sawahlunto Tahun 2014..... | 1-22 |
| Tabel 1.9 | Jumlah Rumah dengan Kepemilikan Jamban dan Pengelolaan Air Limbah Kota Sawahlunto Tahun 2014 | 1-23 |
| Tabel 1.10 | Permasalahan dan Tantangan Pelayanan AMPL dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto | 1-28 |
| Tabel 2.1 | Program Prioritas RAD-AMPL Kota Sawahlunto Dalam Rangka Pencapaian Target 100-0-100 Universal Access..... | 2-3 |
| Tabel 2.2 | Jadwal Kegiatan Pendataan 100-0-100 | 2.9 |
| Tabel 2.3 | Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kota Sawahlunto | 2.11 |
| Tabel 4.1 | Formulir Evaluasi Hasil RAD AMPL Kota Sawahlunto | 4-3 |
| Tabel 5.1 | Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019 | 5-3 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|------|
| Gambar 1.1Peta Administrasi Kota Sawahlunto | 1-7 |
| Gambar 1.2 Peta Kelerengan Kota Sawahlunto | 1-9 |
| Gambar 1.3Peta Geohidrologi Kota Sawahlunto | 1-12 |
| Gambar 1.4Peta Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk.... | 1-15 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|--|
| AMPL | : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan |
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| APM | : Angka Partisipasi Murni |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BLH | : Badan Lingkungan Hidup |
| IPA | : Instalasi Pengolahan Air |
| IPLT | : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja |
| ISPA | : Infeksi Saluran Pernafasan Akut |
| MDGs | : Millennium Development Goals |
| PAD | : Pendapatan Asli Daerah |
| Pamsimas | : Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDRB | : Pendapatan Domestik Regional Bruto |
| PERDA | : Peraturan Daerah |
| PERMEN | : Peraturan Menteri |
| PLTU | : Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PMPKB | : Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana |
| POKJA | : Kelompok Kerja |
| RAD | : Rencana Aksi Daerah |
| RDTR | : Rencana Detail Tata Ruang |
| RENSTRA | : Rencana Strategis |
| RPIJM | : Rencana Program Investasi Jangka Menengah |
| RPJMD | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RTRW | : Rencana Tata Ruang Wilayah |
| Sanimas | : Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SOTK | : Struktur Organisasi Tata Kerja |
| SPAL | : Saluran Pembuangan Air Limbah |
| SPAM | : Sistem Pengolahan Air Minum |
| TPA | : Tempat Pembuangan Akhir |
| TPM | : Tempat Pengolahan Makanan |

TPS : Tempat Pembuangan Sementara
TTU : Tempat-tempat Umum
Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi



WALIKOTA SAWAHLUNTO

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Waa ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama penyusunan **Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)** Kota Sawahlunto untuk Tahun 2015 - 2019.

Perlu kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini, air bahkan sudah menjadi komoditi ekonomi. Berdasarkan laporan WHO-Unicef dalam joint monitoring tahun 2004, kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia Tahun 2010 adalah 231 Juta jiwa, dimana 108 juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 51 juta jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka dimaksud akan lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.

Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Untuk itu, perlunya perhatian bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak di masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia berkomitmen untuk memenuhi target Universal Access 100-0-100 khususnya di bidang *Water Supply and Sanitation*. Adapun tujuan Universal Access adalah 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi pada Tahun 2019.

Pelayanan air minum dan sanitasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berbasis lembaga dan berbasis masyarakat membutuhkan penyelenggaraan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan (sanitasi) untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat sampah dan air limbah.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan dasar air minum dan penyehatan lingkungan, dukungan pemerintah dilaksanakan melalui program **Pamsimas** yang bertujuan meningkatkan jumlah warga miskin yang dapat mengakses fasilitas air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Program Pamsimas

dirancang untuk mendorong agar Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program pendukung sektor air minum dan sanitasi, yang melibatkan berbagai stakeholder baik tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten dan masyarakat.

Sebagai upaya dalam percepatan replikasi dan pengarusutamaan program Pamsimas salah satu upaya tersebut adalah dengan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) dengan melibatkan Pokja AMPL dan Tim Koordinasi Kota (TKK) Pamsimas.

Dokumen RAD AMPL hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pemrioritasan program kerja dan kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPD terkait.

Selanjutnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya Pokja AMPL, TKK Pamsimas dan Tim Penyusun Dokumen RAD AMPL ini yang telah membantu dalam penyusunan RAD AMPL ini.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua sehingga pelaksanaan RAD AMPL ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi masyarakat Kota Sawahlunto

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sawahlunto, 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan ridho-Nya, Kota Sawahlunto telah dapat menyusun dokumen **“Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kota Sawahlunto”**


Buku ini di buat dengan pertimbangan untuk menyusun dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian target Universal Access 100-0-100 Tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada yang terhormat;

1. Bapak Walikota Sawahlunto selaku Pembina, pengarah dan pengambil kebijakan sehingga Kota Sawahlunto dapat mengikuti Program Penyusunan RAD-AMPL;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor Instansi di Lingkungan Kota Sawahlunto yang telah memberikan data-data untuk mendukung penyusunan buku ini;
3. Tim Pokja AMPL Kota Sawahlunto yang telah membantu dalam penyempurnaan isi dari buku ini;
4. Tim Penyusun RAD AMPL yang telah menyusun dokumen ini hingga terlaksananya Buku RAD AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan dokumen **“Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019”** ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sawahlunto, 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Selaku Ketua Pokja AMPL


Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Nip. 19690829 199009 1 001

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang menetapkan target baru yaitu Universal Access (100-0-100) diakhir tahun 2019. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kota Sawahlunto menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2015-2019 sebagai instrument percepatan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Universal Access tersebut dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum, penyehatan

lingkungan dan penanganan kawasan kumuh untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

1.1.1. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (pemerintah/APBD, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum, penyehatan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access, khususnya target cakupan penduduk yang mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan*. RAD-AMPL memuat sinergi kebijakan pusat dan daerah serta menjadi dokumen yang harus digunakan daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

RAD AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 merupakan dokumen daerah yang bertujuan sebagai:

- Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS dan P2KP serta pendekatan kelembagaan.
- Instrumen kebijakan daerah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2015-2019.
- “*Channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.
- Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL
- Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS dan P2KP.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kota Sawahlunto dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target Universal Access dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

1.1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan
3. Pengelolaan air limbah
4. Pengelolaan limbah rumah tangga
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
4. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
5. Program pengelolaan lingkungan
6. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat

1.1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Universal Access Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Mengemukakan kondisi umum pembangunan Kota Sawahlunto berkaitan dengan status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target Universal Access.

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target 100-0-100 Universal Access 2019;

Mengemukakan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian target AMPL 2019. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (*roadmap*) nasional percepatan pencapaian Universal Access dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

Bab III Program dan Kegiatan Prioritas 2015-2019;

Mengemukakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian target AMPL 2019 yang akan dituangkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja SKPD.

Bab IV Pemantauan dan Evaluasi;

Mengemukakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait dalam upaya pelaksanaan program AMPL tahun 2015-2019.

Bab V Penutup;

Berisikan kesimpulan terhadap dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019.

1.2 KONDISI UMUM KOTA

1.2.1 Batas Administrasi

Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa, Sedangkan batas wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar,
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Solok,
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung,
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Solok.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang yang mempunyai luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km².

Tabel berikut, menjelaskan secara rinci tentang luas wilayah, jumlah RT, RW, Dusun, di Kota Sawahlunto perkecamatan dan perdesa/kelurahannya.

Tabel 1. 1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

| No | Kecamatan Desa/Kelurahan | RT | RW | Dusun | Luas Wilayah (KM ²) |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| (1) | Kecamatan Barangin | 32 | 13 | 24 | 88,55 |
| 01 | Lumindai | | | 5 | 20,10 |
| 02 | Balai Batu Sandaran | | | 3 | 12,95 |
| 03 | Saringan | 11 | 5 | | 0,81 |
| 04 | Lubang Panjang | 7 | 2 | | 1,00 |
| 05 | Durian I | 6 | 2 | | 1,17 |
| 06 | Durian II | 8 | 4 | | 1,25 |
| 07 | Talago Gunung | | | 4 | 17,30 |
| 08 | Santur | | | 4 | 8,69 |
| 09 | Kolok Mudiak | | | 3 | 8,52 |
| 10. | Kolok Nan Tuo | | | 5 | 16,76 |
| (2) | Kecamatan Lembah Segar | 32 | 14 | 21 | 52,58 |
| 01 | Lunto Barat | | | 4 | 5,11 |
| 02 | Lunto Timur | | | 4 | 4,89 |
| 03 | Pasar Kubang | | | 3 | 9,32 |
| 04 | Kubang Tengah | | | 5 | 20,15 |
| 05 | Kubang Utara Sikabu | | | 5 | 11,56 |
| 06 | Pasar | 6 | 3 | | 0,50 |
| 07 | Kubang Sirakuk Utara | 8 | 2 | | 0,28 |
| 08 | Kubang Sirakuk Selatan | 4 | 2 | | 0,27 |
| 09 | Aur Mulyo | 6 | 3 | | 0,20 |
| 10 | Tanah Lapang | 4 | 2 | | 0,16 |
| 11 | Air Dingin | 4 | 2 | | 0,14 |
| (3) | Kecamatan Silungkang | | | 21 | 32,93 |

| No | Kecamatan Desa/Kelurahan | RT | RW | Dusun | Luas Wilayah (KM ²) |
|--------|-----------------------------|----|----|-------|------------------------------------|
| 01 | Silungkang Oso | | | 4 | 6,57 |
| 02 | Taratak Bancah | | | 3 | 8,43 |
| 03 | Muaro Kalaban | | | 6 | 8,58 |
| 04 | Silungkang Tigo | | | 5 | 5,13 |
| 05 | Silungkang Duo | | | 3 | 4,22 |
| (4) | Kecamatan Talawi | | | 39 | 99,39 |
| 01 | Sikalang | | | 4 | 6,59 |
| 02 | Rantih | | | 2 | 6,22 |
| 03 | Salak | | | 3 | 6,60 |
| 04 | Sijantang Koto | | | 3 | 6,40 |
| 05 | Talawi Hilir | | | 4 | 10,21 |
| 06 | Talawi Mudik | | | 4 | 8,76 |
| 07 | Bukik Gadang | | | 3 | 7,74 |
| 08 | Batu Tanjung | | | 4 | 15,90 |
| 09 | Kumbayau | | | 4 | 8,36 |
| 10 | Data Mansiang | | | 2 | 6,29 |
| 11 | Tumpuak Tengah | | | 6 | 16,32 |
| Jumlah | | 64 | 27 | 105 | 273,45 |

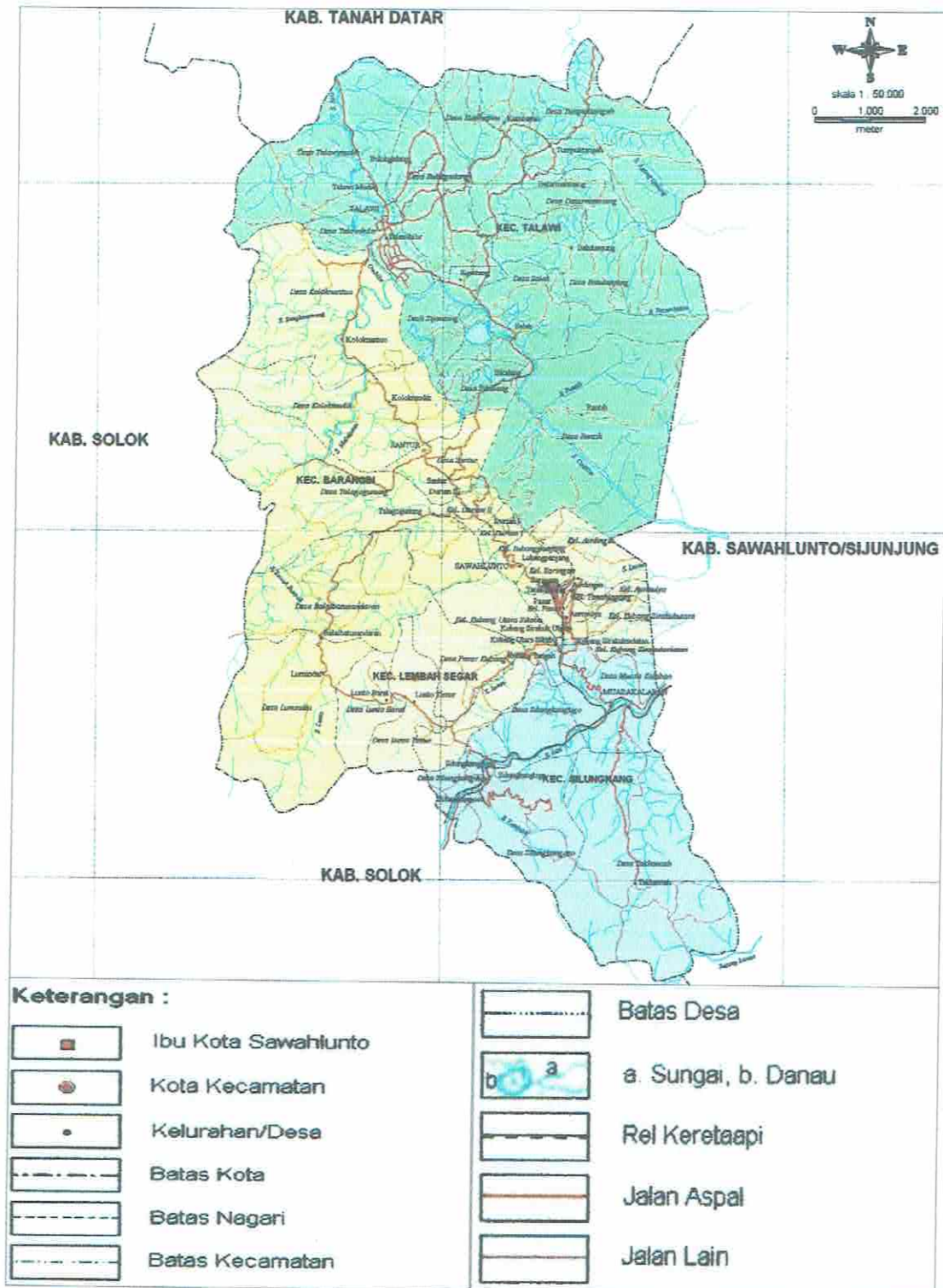
Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2013

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dijelaskan, bahwa Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 36,36% atau sebesar 99,39 KM², kemudian Kecamatan Barangin dengan persentase luas wilayah sebesar 32,38% atau sebesar 88,55 KM², adapun Kecamatan Lembah Segar merupakan Kecamatan terluas ketiga dengan prosentase 19,23% atau 52,58 KM², sedangkan Kecamatan Silungkang adalah kecamatan terkecil dengan prosentase 12,04% atau 32,93 KM².

Rata-rata luas wilayah perdesa/kelurahannya adalah 7,39 KM², dengan desa/kelurahan terluas adalah Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar dengan luas wilayah 20,15 KM², sedangkan desa/kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar dengan luas wilayah 0,14 KM².

Jarak tempuh desa/kelurahan ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto, tercatat 54,05% atau 20 dari 37 desa/kelurahan berada dalam katagori jauh. Kecamatan Talawi adalah kecamatan dengan 100% jumlah desa/kelurahannya memiliki jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto diatas 9,91 KM, sedangkan Kecamatan Silungkang dengan 80% atau 4 dari 5 desa/kelurahannya memiliki jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan Kota Sawahlunto diatas 9,91 KM.

Namun jauhnya jarak tempuh desa/kelurahan dari pusat pemerintahan Kota Sawahlunto tidak identik dengan jauhnya desa/kelurahan dari layanan publik, karena beberapa kewenangan layanan publik telah dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan. Rata-rata jarak tempuh desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 4,71 KM,



Gambar. 1.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto
Sumber: RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

1.2.2 Topografi

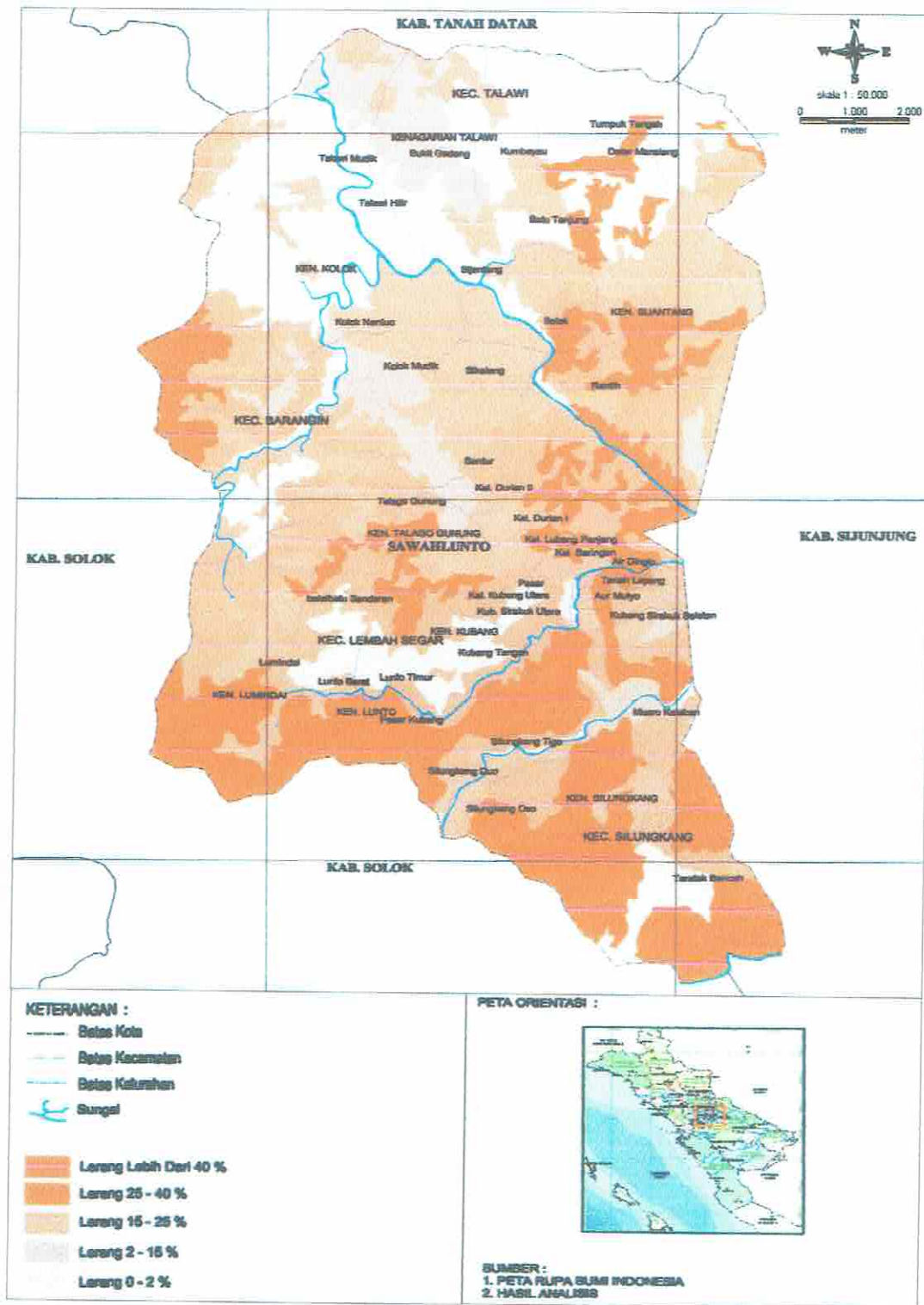
Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara \pm 250 – 650 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan, bagian Timur dan Selatan mempunyai topografi yang relative curam (kemiringan lebih dari 40%) yang luasnya 28,52% dari luas wilayah keseluruhan, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relative datar. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor penghambat pengembangan wilayah.

Bentang alam yang landai terletak di tengah wilayah Kota Sawahlunto, merupakan jalur-jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya.

Tabel 1. 2
Luas dan Tingkat Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto

| No | Kecamatan | Luas Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (%) | | | | | Jumlah (Ha) |
|--------|--------------|--|--------|---------|---------|-------|-------------|
| | | 0 - 2 | 2 - 15 | 15 - 25 | 25 - 40 | > 40 | |
| 1 | Talawi | 991 | 1.420 | 2.680 | 3.195 | 1.653 | 9.939 |
| 2 | Barangin | 343 | 1.514 | 1.432 | 3.450 | 2.136 | 8.875 |
| 3 | Lembah Segar | 240 | 358 | 694 | 1.836 | 2.110 | 5.238 |
| 4 | Silungkang | 29 | 288 | 735 | 340 | 1.901 | 3.293 |
| Jumlah | | 1.603 | 3.580 | 5.541 | 8.821 | 7.800 | 27.345 |

Sumber: BPN Kota Sawahlunto



Gambar. 1.2
Peta Kelerengan Kota Sawahlunto
Sumber : RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

1.2.3 Geohidrolisis

Wilayah Kota Sawahlunto dilalui oleh 5 (lima) buah sungai utama, dengan berbagai pemanfaatannya, yaitu :

a) **Batang Ombilin**

Sungai ini mengalir dari Utara ke Selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih di Kecamatan Talawi. Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar di wilayah Kota Sawahlunto sebagai sumber air baku bagi PDAM dan pembangkit listrik PLTU Sijantang. Sungai ini berhulu di Danau Singkarak, debit sungai ini di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik atau 17.190 liter/detik.

b) **Batang Malakutan**

Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai pengairan, pengambilan bahan galian C dengan debit rata-rata 25 liter/detik.

c) **Batang Lunto**

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur melalui Desa Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang, Kubang Tengah, Kelurahan Pasar, Tanah Lapang dan Air Dingin membelah Kota Sawahlunto, Kecamatan Lembah Segar dan bermuara di Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai sumber air baku PDAM, irigasi, pengambilan bahan galian C dan mandi, cuci, kakus sebagian masyarakat dengan debit 40 liter/detik.

d) **Batang Sumpahan**

Sungai ini berhulu di Kelurahan Durian II di Kecamatan Barangin dan di Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin. Pemanfaatannya sebagai sumber air baku PDAM dengan membangun Embung kapasitas 7.500 m³ di hulunya.

e) Batang Lasi

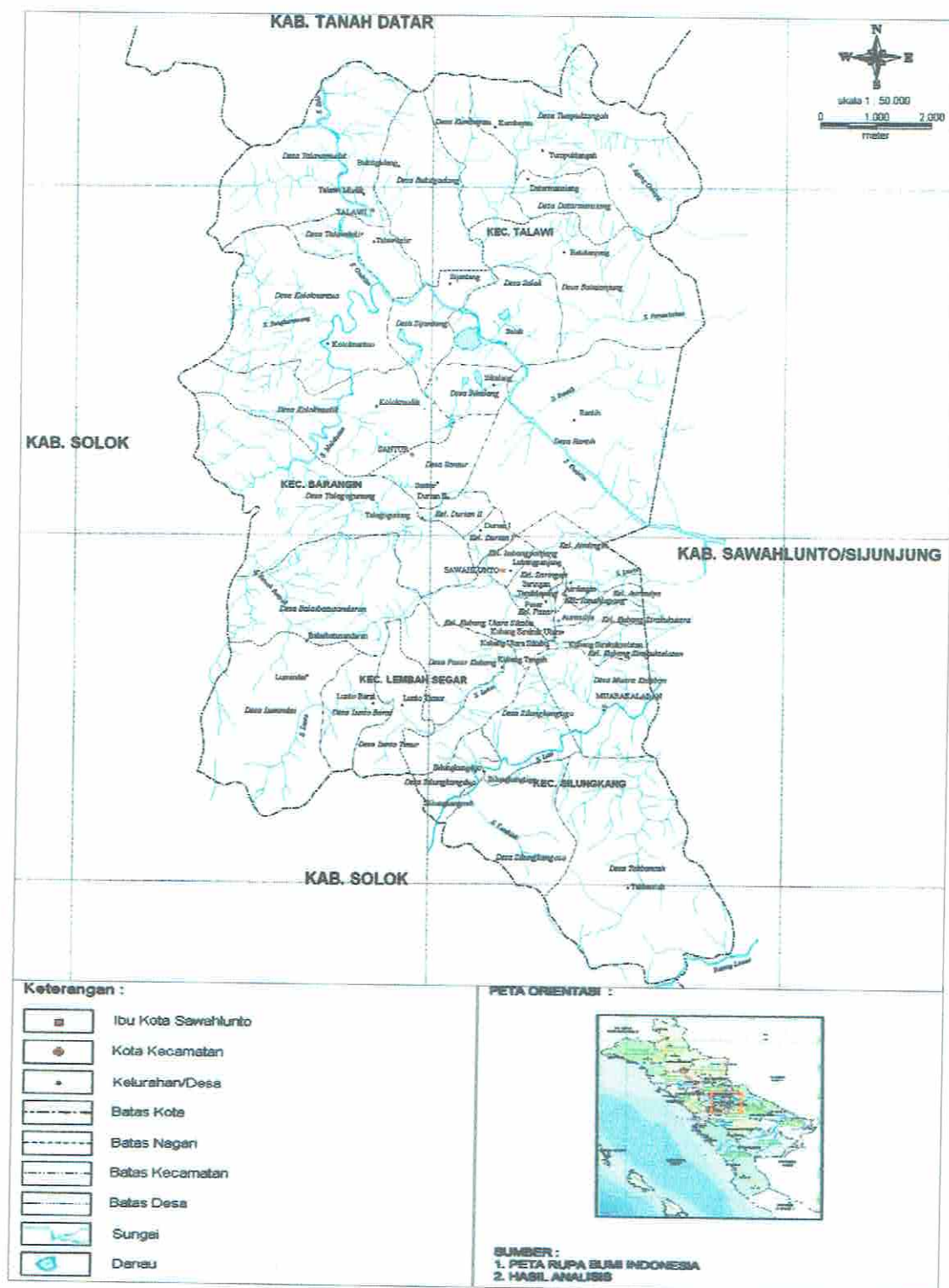
Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan nasional dari Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto-Kabupaten Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan dan Indragiri. Pemanfaatannya untuk pengairan, pengambilan bahan galian C dan tempat mandi, cuci, kakus sebagian masyarakat. Debitnya diperkirakan makin mengecil hanya tinggal 40 liter/detik.

Disamping sungai-sungai utama tersebut, juga terdapat beberapa sungai kecil yang tersebar di beberapa desa antara lain, seperti Batang Piruko, Sungai Bae, Batang Ngungun di Desa Taratak Bancah, Batang Mindai di Desa Lumindai, Batang Sinamo di Desa Rantih dan Batang Kumanih di Desa Tumpuk Tengah yang umumnya dimanfaatkan untuk irigasi dan sumber air minum penduduk setempat. Debit air sungai-sungai ini berkisar antara 5-10 liter/detik.

Air tanah di wilayah Kota Sawahlunto terbatas pada celahan batuan sedangkan lapisan-lapisan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan sebagai lapisan pembawa air atau potensi air tanah kecil.

Sumber mata air yang dijumpai terdapat secara setempat, antara lain ke arah tenggara dari Sawahlunto dan di bukit Sibantar yang berada di desa Sikalang. Mata air ini muncul pada lereng bukit dengan debit kurang dari 2 lt/detik, yang mengalir sepanjang tahun. Sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai sumber air bersih bagi penduduk setempat dengan cara disalurkan melalui pipa paralon (PVC) dan plastik.

Sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih (PDAM) kota Sawahlunto.



Gambar. 1.3
Peta Geohidrologi Kota Sawahlunto
Sumber: RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 sebanyak 54.913 jiwa meningkat pada tahun 2013 menjadi 58.972 jiwa, Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto per Kecamatan Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut;

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Tahun | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
| | | Lk (jiwa) | Pr (jiwa) | Jumlah (jiwa) | Lk (jiwa) | Pr (jiwa) | Jumlah (jiwa) | Lk (jiwa) | Pr (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| 1 | Talawi | 9.017 | 8.928 | 17.945 | 9.117 | 9.026 | 18.143 | 9.267 | 9.181 | 18.448 |
| 2 | Barangin | 8.457 | 8.717 | 17.174 | 8.547 | 8.830 | 17.377 | 8.715 | 8.966 | 17.681 |
| 3 | Lembah Segar | 5.876 | 6.274 | 12.150 | 5.849 | 6.262 | 12.111 | 5.911 | 6.295 | 12.206 |
| 4 | Silungkang | 5.158 | 5.140 | 10.298 | 5.312 | 5.194 | 10.506 | 5.312 | 5.325 | 10.637 |
| Jumlah | | 28.508 | 29.059 | 57.567 | 28.825 | 29.312 | 58.137 | 29.205 | 29.767 | 58.972 |

Sumber: BPS Kota Sawahlunto, Tahun 2013

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2013, dapat dilihat distribusi penduduk Kota Sawahlunto, dimana Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 18.448 Jiwa (31,28%); kemudian diikuti oleh Kecamatan Barangin dengan jumlah penduduk 17.681 Jiwa (29,98%); setelah itu, Kecamatan Lembah Segar dengan jumlah penduduk 12.206 Jiwa (20,70%); dan Kecamatan Silungkang dengan jumlah penduduk 10.637 Jiwa (18,04%).

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 273,45 Km², yang didiami oleh 58.972 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sawahlunto adalah sebanyak 215,66 Jiwa/Km². Kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Silungkang dengan 323,02 Jiwa/KM², kemudian diikuti dengan Kecamatan Lembah Segar sebesar 232,14 Jiwa/KM², dan Kecamatan Barangin sebesar 199,67 Jiwa/KM². Sedangkan Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 185,61 Jiwa/KM².

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2013

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Persentase (%) | Luas Wilayah (Km2) | Persentase (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²) |
|--------|--------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 1 | Talawi | 18.448 | 31,28 | 99,39 | 36,35 | 185,61 |
| 2 | Barangin | 17.681 | 29,98 | 88,55 | 32,38 | 199,67 |
| 3 | Lembah Segar | 12.206 | 20,70 | 52,58 | 19,23 | 232,14 |
| 4 | Silungkang | 10.637 | 18,04 | 32,93 | 12,04 | 323,02 |
| Jumlah | | 58.972 | 100,00 | 273,45 | 100,00 | 215,66 |

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2013

1.3 KONDISI UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai target Misi Kota nomor (b) yaitu “Meningkatkan Fasilitas dan Pelayanan Umum” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto 2013-2018 nomor (2) yaitu “Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur” dikaitkan dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019, dimana pada tahun 2019 harus mencapai Universal Access terhadap 100% air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA) sebagai sebuah studi partisipatif untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pengembangan program sanitasi dan advokasi bagi daerah dalam mencapai Universal Access tersebut.

Pada umumnya pelayanan air minum dan sanitasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lembaga dan pendekatan berbasis masyarakat. Penyelenggaraannya memerlukan keterpaduan dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat limbah sampah dan air limbah.

Tahun 2015 merupakan momentum yang strategis untuk mewujudkan komitmen daerah terhadap pencapaian target Universal Access tersebut dibidang air minum dan sanitasi (Water Supply and Sanitation). Adapun tujuan Universal Access dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap layanan air minum dan sanitasi dan menghilangkan adanya kawasan kumuh, sehingga pada tahun 2019 target tersebut dapat tercapai.

Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Milenium secara Nasional, Kota Sawahlunto ikut berupaya menyelesaikan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Milinium (MDGs) yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada indikator 7C yaitu ditempuh dengan 4 target :

Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

Pelayanan air minum dan sanitasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berbasis lembaga dan berbasis masyarakat membutuhkan penyelenggaraan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan (sanitasi) untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat sampah dan air limbah.

1.3.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Perkembangan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi (AMPL) Kota Sawahlunto selama tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun, jika ditinjau dari sebaran penduduk yang telah mengakses air minum layak baru sekitar 87,85% dari jumlah penduduk. Sedangkan cakupan akses sanitasi baru sekitar 74,63% dari jumlah penduduk.

Tabel 1.5
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Sawahlunto
Tahun 2013–2014

| No | Indikator | Capaian Kota Sawahlunto | | Target SPM Sumbang | Target Universal Access |
|----|---|-------------------------|-------|--------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 |
| 1 | Proporsi penduduk (%) dengan akses air minum yang layak | 51,43 | 87,85 | 70,00 | 100,00 |
| 2 | Proporsi penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak | 47,50 | 74,63 | 65,00 | 100,00 |

Sumber: Hasil Analisis

Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang telah dilaksanakan di Kota Sawahlunto hingga tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Air Minum

Secara umum di Kota Sawahlunto terdapat sistem penyediaan dan pengelolaan air minum, yaitu sistem perpipaan dan non perpipaan.

1) Sistem Perpipaan PDAM

Sumber air baku untuk keperluan sehari-hari penduduk seperti untuk rumah tangga, industri dan untuk kebutuhan lain sebagian besar berasal dari PDAM dengan sumber air permukaan sungai. Kualitas air yang ada cukup baik untuk dikonsumsi kecuali di beberapa daerah tertentu airnya agak kecoklatan sehingga bila akan diminum perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Fasilitas air minum PDAM ini baru tersedia di kawasan perkotaan dan pinggiran perkotaan.

Cakupan pelayanan air minum PDAM pada tahun 2014 mencapai 67,90% (berdasarkan fisik rumah), atau 46,18% (berdasarkan jumlah jiwa penduduk). Jika dihitung berdasarkan jumlah fisik rumah yang ada, maka kecamatan yang paling banyak terlayani PDAM adalah Kecamatan Talawi (61,24%), Kecamatan Barangin (56,80%), dan Kecamatan Lembah Segar (37,54%), sedangkan kecamatan dengan jumlah layanan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan 2,04%.

Tabel 1.6
Jumlah Rumah (Fisik), Sambungan Rumah PDAM
Kota Sawahlunto 2013-2014

| No | Kecamatan | 2013 | | | | | 2014 | | | | |
|--------|--------------|---------------------|-------------------|-------|----------|-------|---------------------|-------------------|-------|----------|-------|
| | | Rumah ^{*)} | SR ^{**)} | % | Penduduk | % | Rumah ^{*)} | SR ^{**)} | % | Penduduk | % |
| 1 | Talawi | 3.413 | 2.820 | 82,63 | 18.448 | 76,44 | 3.992 | 2.795 | 81,90 | 18.681 | 74,81 |
| 2 | Barangin | 3.653 | 2.779 | 76,08 | 17.681 | 78,59 | 4.075 | 2.881 | 77,60 | 17.918 | 80,40 |
| 3 | Lembah Segar | 2.648 | 1.282 | 48,42 | 12.206 | 52,52 | 2.670 | 1.271 | 47,20 | 12.214 | 52,03 |
| 4 | Silungkang | 2.012 | 265 | 13,17 | 10.637 | 12,46 | 2.200 | 190 | 9,45 | 10.795 | 8,80 |
| Jumlah | | 11.726 | 7.146 | 60,95 | 58.972 | 60,59 | 12.937 | 7.137 | 60,36 | 59.608 | 59,87 |

Keterangan

- *) : Jumlah Fisik Rumah (sumber data Dinas Kesehatan Kota)
 **) : Jumlah Sambungan Rumah (sumber data PDAM)
 ***) : Jumlah Penduduk 2013 dan 2014 (sumber data BPS)

Upaya peningkatan cakupan layanan, terus dilaksanakan oleh pihak PDAM, baik dari aspek kualitas air maupun penambahan jumlah sambungan rumah. Potensi penambahan sambungan rumah masih sangat dimungkinkan terkait beberapa peluang seperti:

- Tingkat kebocoran dan kehilangan air yang mencapai 35,08% (Tahun 2009), yang terus ditekan sampai menjadi 25,00% pada Tahun 2019.
- Adanya air produksi yang tidak terdistribusi yang mencapai 10,36% (Tahun 2009), sehingga terdistribusi 100% pada Tahun 2019.

Upaya penambahan sambungan rumahpun terkendala, mengingat PDAM selalu mengalami kerugian dengan nilai yang fluktuatif. Kerugian PDAM pada tahun 2009 mencapai kisaran 709 juta rupiah.

Beberapa faktor yang menyebabkan struktur keuangan PDAM merugi adalah;

- Biaya langsung usaha mencapai 72,90% (Thn 2009)
- Biaya tidak langsung (umum dan administrasi) yang mencapai 27,10% (Thn 2009)
- Harga jual di bawah harga pokok produksi

2) Sistem Perpipaan Non PDAM (PAMSIMAS)

Pelayanan air minum sistem perpipaan non PDAM adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program ini adalah berupa hibah Bank Dunia melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang untuk masyarakat berpenghasilan rendah perdesaan yang belum memiliki akses air minum layak. Program ini mulai terlaksana di Kota Sawahlunto pada bulan Mei 2008 yang sampai akhir tahun 2014 telah terlaksana di 56 (lima puluh enam) lokasi desa/dusun/RT dengan jumlah penduduk terlayani air minum sebanyak 21.620 jiwa (5.148 KK) atau 36,27% penduduk dan terlayani sanitasi sebanyak 20.480 jiwa (4.876 KK) atau 34,36% penduduk. Sistem penyediaan dan penyaluran air dari sumber ke daerah pelayanan non PDAM PAMSIMAS ini adalah dengan jaringan perpipaan gravitasi menggunakan teknologi instalasi pengolahan air sederhana (IPAS). Perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengelolaan pasca konstruksi adalah berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumber air sendiri yang ada di setiap lokasi. Pada setiap lokasi yang telah terbangun sistem penyediaan air minumnya, dibentuk Badan Pengelola Sarana (BPS) yang bertanggung jawab mengelola sehingga pelayanan dan penyediaan air dapat dinikmati masyarakat pelanggan. Sebagai aspek legal formal, badan pengelola ini juga dilengkapi dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Aturan Bersama, Akta Pendirian, Rekening Bank dan Administrasi. Berikut ini data lokasi, jumlah penduduk dan penduduk terlayani sistem perpipaan non PDAM PAMSIMAS 2008-2014 sebagai berikut :

Tabel 1.7
Data Lokasi, Jumlah Penduduk dan Penduduk Terlayani
Sistem Perpipaan Non PDAM PAMSIMAS 2008-2014

| NO. | TAHUN/LOKASI | JUMLAH PENDUDUK | | |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | JIWA | TERLAYANI | % |
| I | TAHUN 2008 | 4.306 | 2.506 | 58.20 |
| 1 | Beringin, Balai Batu Sandaran | 382 | 354 | 92.67 |
| 2 | Luak Manih, Kubang Tengah | 332 | 148 | 44.58 |
| 3 | Tabu Lamo-Sialang, Kumbayau | 812 | 68 | 8.37 |
| 4 | Panjaringan, Batu Tanjung | 608 | 216 | 35.53 |
| 5 | Sungai Cacang, Silungkang Oso | 556 | 556 | 100.00 |
| 6 | Dalimo Gadang, Pasar Kubang | 840 | 388 | 46.19 |
| 7 | Kataping-Guguk Balang, Talago Gunung | 776 | 776 | 100.00 |
| II | TAHUN 2009 | 1.653 | 1.208 | 73.08 |
| 1 | Lubuk Nan Gadang, Silungkang Tigo | 500 | 448 | 89.60 |
| 2 | Rumbio, Silungkang Duo | 108 | 108 | 100.00 |
| 3 | Lontiak Maloweh, Pasar Kubang | 401 | 280 | 69.83 |
| 4 | Mato Aia-Padang Elok, Kubang Utara Sikabu | 452 | 180 | 39.82 |
| 5 | Gunung, Balai Batu Sandaran | 192 | 192 | 100.00 |
| III | TAHUN 2010 | 5.288 | 4.166 | 78.78 |
| 1 | Kebun Jeruk, Silungkang Oso | 401 | 401 | 100.00 |
| 2 | Bonou-Pintu Angin, Batu Tanjung | 692 | 432 | 62.43 |
| 3 | Koto Tuo, Lunto Timur | 1.416 | 416 | 100.00 |
| 4 | Pondok Batu Dalam, Kubang Utara Sikabu | 152 | 112 | 73.68 |
| 5 | Tapi Aia, Lunto Barat | 1.190 | 632 | 53.11 |
| 6 | Air Gantang, Balai Batu Sandaran | 224 | 120 | 53.57 |
| 7 | Data Galundi, Batu Tanjung | 736 | 576 | 78.26 |
| 8 | Sawah Tambang, Rantih | 173 | 173 | 100.00 |
| 9 | RT.03-RT.04, Air Dingin | 304 | 304 | 100.00 |
| IV | TAHUN 2011 | 3.406 | 1.907 | 55.99 |
| 1 | Luak Badai, Kubang Utara Sikabu | 268 | 268 | 100.00 |
| 2 | Air Gantang, Kubang Utara Sikabu | 132 | 132 | 100.00 |
| 3 | Tanjung Sago, Batu Tanjung | 519 | 152 | 29.29 |
| 4 | Ujung Karang, Batu Tanjung | 420 | 420 | 100.00 |
| 5 | Talanguong, Salak | 432 | 432 | 100.00 |
| 6 | Guguk Bungo, Lumindai | 668 | 124 | 18.56 |
| 7 | Limau Kambing, Taratak Bancah | 143 | 123 | 86.01 |
| 8 | Pasar Usang-Pasar Baru, Silungkang Tigo | 824 | 256 | 31.07 |
| V | TAHUN 2012 | 2.357 | 1.258 | 53.37 |
| 1 | Gunung Balai, Kolok Nan Tuo | 292 | 241 | 82.53 |
| 2 | Pulau Ambacang, Salak | 84 | 43 | 51.19 |
| 3 | Koto Baru, Kolok Nan Tuo | 142 | 142 | 100.00 |
| 4 | Ibus, Salak | 172 | 70 | 40.70 |
| 5 | Pasar Hilir, Lumindai | 624 | 102 | 16.35 |
| 6 | Tengah Sawah 1, Silungkang Duo | 248 | 222 | 89.52 |
| 7 | Sungai Bae, Taratak Bancah | 55 | 55 | 100.00 |
| 8 | Kebun Jeruk Mudik, Silungkang Oso | 135 | 135 | 100.00 |
| 9 | Batu Tajam, Kubang Tengah | 145 | 80 | 55.17 |
| 10 | Lubuk Kubang, Silungkang Oso | 460 | 168 | 36.52 |
| VI | TAHUN 2013 | 1.620 | 1.443 | 89.07 |
| 1 | Kemiri-Muaro Jaya, Sikalang | 225 | 225 | 100.00 |
| 2 | Tanjung Mulia, Tumpuk Tengah | 308 | 308 | 100.00 |
| 3 | Caniago Gugun, Balai Batu Sandaran | 115 | 115 | 100.00 |
| 4 | Ladang Laweh, Talago Gunung | 195 | 104 | 53.33 |
| 5 | Tengah Sawah, Silungkang Duo | 188 | 169 | 89.89 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 6 | Talang Tuluih, Silungkang Duo | 169 | 142 | 84.02 |
| 7 | RT.02-RT.03, Aur Mulyo | 420 | 380 | 90.48 |
| VII | TAHUN 2014 | 6.340 | 4.244 | 66.94 |
| 1 | Tapian Nambur, Talawi Mudik | 639 | 639 | 100.00 |
| 2 | Bukik Gadang | 1.368 | 876 | 64.04 |
| 3 | Kandang Batu-Talao, Kumbayau | 1.619 | 335 | 20.69 |
| 4 | Bukik Sibanta, Sikalang | 412 | 412 | 100.00 |
| 5 | Koto, Talago Gunung | 250 | 250 | 100.00 |
| 6 | Talang Tuluih Duo, Silungkang Duo | 480 | 195 | 40.63 |
| 7 | Sionsek, Kubang Tengah | 303 | 303 | 100.00 |
| 8 | Stasiun, Silungkang Tigo | 737 | 737 | 100.00 |
| 9 | Panjaringan, Batu Tanjung | 532 | 497 | 93.42 |
| | JUMLAH | 24.970 | 16.732 | 67.01 |

Sumber : Laporan Tahunan DC ROMS – I
Tahun 2014

Dari 24.970 jiwa penduduk di wilayah lokasi rencana, yang menerima akses langsung jaringan perpipaan air minum Pamsimas sebanyak 16.732 jiwa penduduk atau 67,01%. Secara keseluruhan dari jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebanyak 59.608 Jiwa telah dapat dilayani perpipaan non PDAM Pamsimas sebanyak 16.732 jiwa atau 28.07% penduduk.

3) Sistem Non Perpipaan

Tabel berikut menginterpretasikan bahwa 36,41% (fisik rumah) atau 5.208 KK mengakses layanan air bersih non perpipaan.

Tabel 1. 8
Penyediaan Air minum Non Perpipaan
Kota Sawahlunto Tahun 2014

| No | Kecamatan | Jumlah KK | JUMLAH KK | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------|-----------|------|-----------|-------------|
| | | | Sumur Gali | | Mata Air | | SPT | Kran Umum | PAH | Sumur Bor | Hydran Umum |
| | | | Tdk Terlindungi | Terlindungi | Tdk Terlindungi | Terlindungi | | | | | |
| 1 | Talawi | 4.567 | 28 | 222 | 46 | 362 | - | 27 | 543 | - | - |
| 2 | Barangin | 4.242 | 5 | 52 | 29 | 301 | - | 61 | 10 | - | - |
| 3 | Lembah Segar | 3.117 | 24 | 73 | 50 | 1.299 | 1 | 3 | 301 | - | - |
| 4 | Silungkang | 2.376 | 45 | 566 | 59 | 923 | 9 | 167 | 2 | 1 | - |
| Jumlah | | 14.302 | 102 | 913 | 184 | 2.885 | 10 | 258 | 856 | 1 | - |
| Persentase | | | 0,71 | 6,38 | 1,29 | 20,17 | 0,07 | 1,80 | 5,99 | 0,01 | 0,00 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sumber air bersih (Non Perpipaan) yang paling banyak diakses masyarakat adalah

mata air terlindungi (20,17%), sumur gali terlindungi (6,38%), perlindungan air hujan (16,43%), kran umum (1,80%), mata air tidak terlindungi (1,29%), sumur gali tidak terlindungi (0,71%). Sumur pompa tangan (0,07%), sumur bor (0,01%). Kondisi ini umumnya terdapat di desa-desa rawan air seperti Desa Data Mansiang, Bukit Gadang, Kumbayau, Rumbio Silungkang Duo dan Kelurahan Saringan dan Pasar.

2. Sanitasi

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman adalah fasilitas yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Berbagai jenis fasilitas sanitasi pribadi maupun bersama (komunal) ini diklasifikasikan sebagai fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. Kepemilikan jamban dan pengelolaan air limbah dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Rumah Dengan Kepemilikan Jamban dan Pengelolaan Air Limbah Kota Sawahlunto Tahun 2014

| Uraian | Jumlah | Persentase |
|--------------------------------|--------|------------|
| - Jumlah Rumah | 11.824 | 100,00 |
| - Jumlah Rumah Diperiksa | 11.806 | 99,85 |
| - Jumlah Rumah Belum Diperiksa | 18 | 0,15 |
| SARANA JAMBAN | | |
| - Jumlah Rumah Berjamban | 9.587 | 81,08 |
| - Jumlah Rumah Tidak Berjamban | 2.237 | 18,92 |
| - Jumlah Rumah Berjamban MS | 7.890 | 66,73 |

| SARANA PEMBUANGAN AIR LIMBAH YANG DIPERIKSA | | |
|---|-------|-------|
| - Jumlah Rumah dengan SPAL | 8.643 | 73,10 |
| - Jumlah Rumah Tidak ada SPAL | 3.181 | 26,90 |
| - Jumlah Rumah dengan SPAL MS | 6.052 | 51,18 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto 2014

Kebijakan Daerah yang berimplikasi terhadap Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Sawahlunto.

Mengingat sanitasi merupakan urusan wajib daerah yang bersifat lintas sektor, terbentuknya Pokja AMPL Kota Sawahlunto 2011 merupakan kebijakan atau produk dari dinamika kelembagaan sanitasi lokal, regional, nasional, yang sifatnya sementara, dengan beberapa latar belakang pertimbangan seperti lemahnya koordinasi, sinergi, dan integrasi.

Selama ini SKPD terkait bidang sanitasi menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat temporer dan belum memiliki rencana strategis sesuai dengan regulasi/kelembagaan yang menaunginya. Berdasarkan aspek non teknis kebijakan daerah dan kelembagaan ini, maka diidentifikasi isu strategisnya sebagai berikut:

A. Isu Strategis Aspek Kebijakan Daerah

1. Komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk bebas ODF tahun 2018;
2. Komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk "Sapu Bersih Kemiskinan" tahun 2018;
3. Misi-3 dan Misi-4 RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018;
4. Misi Kota Sawahlunto untuk mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai "Kota Wisata, Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan, Kota yang Berbudaya dan Kota Sejahtera";
5. Adanya pembangunan bidang non-sanitasi yang menjadi prioritas pemerintah kota, menjadikan pembangunan bidang sanitasi sebagai prioritas selanjutnya.

B. Isu Strategis Aspek Kelembagaan

1. Dokumen perencanaan sektor sanitasi yang ada belum sepenuhnya menjadi acuan semua SKPD dalam menyusun rencana kerjanya;
2. Belum terdeskripsikannya kebijakan sanitasi skala makro kedalam kebijakan sanitasi rencana strategis SKPD;
3. Koordinasi perencanaan program sanitasi yang sudah dan sedang berjalan dengan strategi dan implementasi kegiatan sanitasi lainnya, kurang maksimal;
4. Organisasi kelembagaan di daerah terhadap dinamika dan perubahan regulasi di tingkat pusat belum sepenuhnya dapat diikuti secara optimal;
5. Belum adanya lembaga yang memicu tumbuh dan berkembangnya partisipasi publik dan swasta untuk pembangunan sanitasi.

1.4 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

a. Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan dapat menurunkan kuantitas sumber air minum, ditambah lagi sistem sanitasi *on-site* yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga pencemaran terhadap sumber air baku meningkat.

4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.

Tingkat investasi dalam penyediaan sumber air dan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (*sewerage system*) dan skala komunal (*communal system*), dengan berbagai kendalanya.

5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar 47% persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun 76,19 % dari air tersebut masih mengandung bakteri *E. coli*. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah

dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.

Kinerja PDAM yang belum optimal semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka dan bernilai ekonomis. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (*full-cost recovery*). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia di bidang air minum pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan

sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

b. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan serta penanganan kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10
Permasalahan dan Tantangan Pelayanan AMPL
dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto

| Aspek | Permasalahan | Tantangan |
|--------|--|---|
| Teknis | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat kebocoran PDAM yang relatif tinggi ➤ Terbatasnya pilihan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber air baku ➤ Kondisi topografi Kota Sawahlunto yang ekstrim. ➤ Terbatasnya daerah pelayanan ➤ Tingginya persentasi saluran pembuangan air limbah yang kondisinya tidak sesuai standar ➤ Beberapa kawasan kumuh milik BUMN yang sulit diintervensi PEMDA | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku ➤ Perlu dicari sumber air alternatif oleh PDAM untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk (IPA Regional) ➤ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum ➤ Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar ➤ Penanganan kawasan kumuh memerlukan keterpaduan yang komprehensif |
| Sosial | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemahaman masyarakat tentang PHBS masih terbatas ➤ Perilaku BABS di sembarangan tempat masih dipandang lumrah oleh sebagian besar masyarakat pedesaan ➤ Pemahaman masyarakat bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis ➤ Perilaku masyarakat di perumahan khusus cenderung eksklusif | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka kejadian penyakit akibat air (seperti diare) belum tertangani secara tuntas ➤ Badan pengelola air minum di tingkat masyarakat sulit berkembang karena rendahnya kemauan membayar masyarakat sesuai tarif minimal ➤ Bahwa sumber air sudah langka dan air bukan benda sosial akan tetapi bernilai ekonomi ➤ Interaksi sosial masyarakat harus |

| Aspek | Permasalahan | Tantangan |
|-------------|---|--|
| | | dikembangkan untuk pembangunan kawasan |
| Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ sumber air baku yang tercemar ➤ Adanya kawasan yang mengalami kekeringan ➤ Tingginya tingkat pencemaran sungai oleh limbah domestic dan industri | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semakin menurunnya luas daerah tangkapan air dengan adanya pengembangan pemukiman baru dan tidak teratur ➤ Semakin tingginya pemanfaatan air tanah yang dapat mempercepat penurunan muka air tanah ➤ Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan ➤ Industri kecil dan industri rumah belum memiliki sarana pengolahan limbah dan cenderung membuang limbah di tempat terbuka |
| Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan PDAM masih kurang untuk memperluas cakupan pelayanan ➤ Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat khususnya di perdesaan ➤ Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu ditingkatkan koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan ➤ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2015 ➤ Kinerja AMPL belum menjadi prioritas dalam pemantauan dan peningkatan kinerja daerah ➤ BPSPAMS di Lokasi PAMSIMAS belum dipandang sebagai potensi UKM dan penyedia layanan air minum dan sanitasi yang dapat diandalkan ➤ Adanya dua dasar hukum untuk koordinasi AMPL (POKJA AMPL, dan POKJA Sanitasi) |
| Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alokasi APBD untuk AMPL perlu lebih ditingkatkan lagi ➤ Masih terbatasnya kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan investasi di | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama antar daerah untuk pendanaan AMPL belum dioptimalkan ➤ Dukungan politik anggaran masih |

| Aspek | Permasalahan | Tantangan |
|-------|---|---|
| | <p>bidang air minum dan sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target 7C MDGs dan Target universal Acces ➤ Dana CSR BUMN belum menyentuh sektor AMPL dan Kawasan Kumuh | <p>belum berpihak pada air minum dan sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Daerah ➤ Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran ➤ Dokumen perencanaan sektor AMPL dan Kawasan Kumuh khusus untuk peran swasta |

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, isu strategis penyediaan air minum dan sanitasi serta penanganan kawasan kumuh Kota Sawahlunto yang akan ditangani sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Bisnis Plan PDAM harus mampu memenuhi target cakupan pelayanan 100% tahun 2019.
- 2) Perluasan cakupan akses air minum.
- 3) Jaminan ketersediaan debit sumber air baku yang sustainable dan dapat diandalkan.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 5) Dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh.
- 6) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi serta kawasan kumuh.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (RPJMN III) 2015-2019 menetapkan target pencapaian akses air minum 100% mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019. Target pencapaian tersebut dinamai dengan “Gerakan 100-0-100”.

Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, pemerintah optimis target Millenium Development Goal (MDGs) untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai dan target akses sanitasi MDGs sebesar 62,40% penduduk yang diperkirakan juga dapat tahun 2015. Oleh karenanya bila perkiraan tersebut benar, maka pada akhir tahun 2015 masih ada sekitar 31,13% masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap air minum dan sekitar 37,60% masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan sehat.

Kemudian bila dibandingkan dengan tingkat capaian Kota Sawahlunto hingga akhir tahun 2014, untuk sektor air minum telah mencapai 88,68% penduduk dan sanitasi telah mencapai 76,16%. Bila data tingkat capaian tersebut benar, maka pada awal tahun 2015 masih ada sekitar 11,32% masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap air minum dan sekitar 23,84% masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan sehat.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

2.1.1 Air Bersih

Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sampai dengan tahun 2019 di Kota Sawahlunto bertujuan untuk :

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kinerja teknis pengelolaan PDAM.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih yang layak dan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai sampai dengan akhir 2019 adalah :

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 88,68 % menjadi 100,00 % tahun 2019
2. Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh PDAM sebesar 30.000 jiwa
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

2.1.2 Sanitasi

Peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi sampai dengan 2019 di Kota Sawahlunto bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,16 % menjadi 100,00 % tahun 2019
2. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi di Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Program Prioritas RAD-AMPL Kota Sawahlunto Dalam Rangka Pencapaian Target 100-0-100 Universal Access

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA AKHIR 2019 | Program | Kegiatan |
|-----|---|--|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan | <div>1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 88,68 % menjadi 100,00 %</div> <div>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih</div> <div>3. Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk</div> | <div>Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)</div> <div>Tambahan cakupan pelayanan (jiwa)</div> <div>Terlaksananya koordinasi lintas sektor pembangunan AMPL-PAMSIMAS (%)</div> | <div>100,00%</div> <div>30.000</div> <div>100%</div> | <div>1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum</div> <div>2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</div> <div>3. Program Sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PAMSIMAS)</div> <div>4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</div> | <div>1. Peningkatan Cakupan Pelayanan</div> <div>2. Pengendalian Kehilangan Air</div> <div>3. Optimalisasi Sarana dan prasarana produksi dan distribusi.</div> <div>4. Peningkatan Jumlah Pelanggan</div> <div>5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan</div> <div>6. Fasilitas dan stimulan air bersih berbasis masyarakat</div> <div>7. Penguatan Kelembagaan BPSPAM</div> <div>8. Penguatan kelembagaan peduli air bersih</div> <div>9. Advokasi penyediaan air minum berkualitas</div> <div>10. Pengawasan kualitas air minum perpipaan</div> <div>11. Monitoring air bersih masyarakat pedesaan non perpipaan</div> <div>12. Penghijauan kawasan</div> |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA AKHIR 2019 | Program | Kegiatan |
|-----|--|---|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 | Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan | 1. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,16% menjadi 100,00% | Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%) Tambahan cakupan pelayanan (jiwa) Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%) Jumlah Desa ODF Terbentuknya Forum Kota Sehat dan Kota bersih Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas | 100,00 35.000 100,00 37 1 62 | 1. Program Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal 2. Program Pembangunan Saluran Drainase 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Peningkatan Kinerja IPLT 2. Peningkatan kapasitas IPLT 3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Pembangunan IPAL Kawasan 5. Pembangunan Septik Tank Komunal Kawasan 6. Pembangunan Septik Tank Komunal Untuk RSH 7. Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 8. Pembangunan MCK++ 9. Pembangunan Saluran Drainase Kota (Primer, Sekunder, Tersier) 10. Normalisasi Sungai Bt Lunto, Bt Lasi, Bt Sumpahan 11. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 12. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 13. Pelatihan MPA PHAS / CLTS 14. Pelatihan Hygiene dan sanitasi untuk guru |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA AKHIR 2019 | Program | Kegiatan |
|-----|---|---|--|---------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3 | Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat | Jumlah pesan PHBS ke Masyarakat melalui spanduk stiker dll. | 25 | Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat |
| | | | Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan (desa/Kelurahan) | 37 | | |
| 4 | Meningkatkan masyarakat partisipasi dalam pengelolaan jaringan air bersih | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih | Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya | 56 | Peningkatan masyarakat membangun desa | 1. Fasilitas BPSPAMS 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan |
| | | | Teridentifikasinya pengelolaan BPSPAMS | 56 | Peningkatan masyarakat membangun desa | |

Penetapan pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian tujuan sasaran tahun 2015-2019 tersebut.

2.1.3 Kawasan Kumuh

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015 – 2019 telah menetapkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019, target pencapaian tersebut dinamai dengan “gerakan 100-0-100”.

Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, Pemerintah optimistis target *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai, dan target akses sanitasi MDGs sebesar 62,4% penduduk yang diperkirakan juga dapat terwujud pada tahun 2015. Oleh karenanya bila perkiraan tersebut benar, maka pada akhir 2015 masih ada sekitar 31,13% masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap penyediaan air minum dan sekitar 37,6% masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan sehat.

Untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kab/Kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya.

Pelaksanaan kolaborasi gerakan 100-0-100 di setiap Pemerintahan Kabupaten/Kota akan menunjukkan seberapa baiknya daerah melayani kebutuhan mendasar masyarakat khususnya dibidang infrastruktur permukiman ini.

Sebagai tahap awal yang penting dalam kolaborasi tersebut maka perlu dilakukan Pendataan 100-0-100 di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). Melalui Survey Baseline ini, diharapkan diperoleh data 100-0-100 seluruh lokasi yang akan menjadi tolak ukur pencapaian target pada akhir tahun 2019.

Pendataan 100-0-100 ini pada prinsipnya merupakan pengayaan dari Pemetaan Swadaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat khususnya melalui PNPM Mandiri, yang fokusnya pada penggalian data 100-0-100 dan juga kumuh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Data 100-0-100 ini nantinya diharapkan akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan di Evaluasi pencapaiannya secara periodik sampai dengan tenggat waktu Tahun 2019.

Untuk kebutuhan itulah maka perlu disusun Prosedur Operasional Baku (POB) Penyusunan Pendataan 100-0-100 sebagai petunjuk bagi semua pelaku khususnya masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendataan 100-0-100.

Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan pendataan 100-0-100 ini adalah :

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data 100-0-100 di wilayahnya ;
2. Mengumpulkan data 100-0-100 dan menyusun profil kawasan permukiman ;
3. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai persoalan kualitas permukiman berdasarkan data 100-0-100.

Metodologi

Secara umum metodologi utama pendataan 100-0-100 ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan masyarakat di dalam seluruh rangkaian proses.

A. Data

Data dimaksud adalah data 100-0-100 yaitu data yang terkait akses air minum (100 kiri), pengurangan luasan kawasan kumuh (0) dan data

yang terkait dengan akses sanitasi yang layak (100 kana). Data tersebut terdiri dari data fisik dan non fisik antara lain :

1. Data fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh yaitu :
 - a. Kondisi bangunan hunian :
 - i. Keteraturan Bangunan
 - ii. Kepadatan Bangunan
 - iii. Kondisi fisik bangunan
 - b. Jalan Lingkungan
 - c. Drainase Lingkungan
 - d. Pembuangan Air Limbah
 - e. Penyediaan air Bersih & Air Minum
 - f. Pengelolaan Persampahan
 - g. Pengamanan Bahaya Kebakaran
2. Data Non Fisik yang terkait dengan infrastruktur permukiman, antara lain :
 - a. Legalitas Pendirian Bangunan
 - b. Kepadatan Penduduk
 - c. Mata Pencarian Penduduk
 - d. Penggunaan Daya Listrik
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - f. Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Seluruh data tersebut akan dijadikan sebagai data 100-0-100 yang nantinya dapat diukur secara periodik pencapaiannya sampai dengan tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Metode Pendataan

Untuk menggali data khususnya di tingkat masyarakat, akan menggunakan 3 metode kajian yaitu :

1. FGD : Digunakan pada saat penggalan data awal di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat di

Desa/Kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk menggali data utama.

2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis (komunitas terkecil).
3. Transek : Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.

C Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran untuk pelaksanaan pendataan 100-0-100 akan dilakukan di lokasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

D. Jadwal

Pelaksanaan Penyusunan data 100-0-100 ini akan dilakukan dalam kurun waktu lebih kurang 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jadwal Kegiatan Pendataan 100-0-100

| NO | Aktifitas | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des |
|----|--|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| 1 | ToT | X | X | | | | | |
| 2 | Pelatihan Fasilitator | | X | X | | | | |
| 3 | Workshop tkt Kota | | | X | | | | |
| 4 | Sosialisasi desa/kel | | | X | | | | |
| 5 | Pelatihan TIPP | | | X | X | | | |
| 6 | Proses Pendataan 100-0-100 | | | X | X | | | |
| 7 | Persiapan Aplikasi Report | | | X | | | | |
| 8 | Rekap dan Profil Kawasan Permukiman Kota/Kab | | | | X | | | |
| 9 | Rekap Nasional | | | | | X | | |

Keluaran

Keluaran yang diharapkan adalah :

1. Rumusan persoalan kualitas permukiman termasuk 7 indikator Kumuh
2. Data 100-0-100 dan profil kawasan permukiman tingkat desa/Kel
3. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100-0-100.

Prinsip-Prinsip

Adapun prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendataan 100-0-100 ini adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

Memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi masyarakat untuk memiliki akses yang sama terhadap pelayanan air minum, permukiman yang layak dan sanitasi yang baik, sebagai kebutuhan mendasar di bidang infrastruktur permukiman.

b. Prinsip Kolaborasi

Prinsip dasar kolaborasi adalah kerjasama dan kesetaraan (esensi dasar), kebersamaan, berbagi tugas, tanggung jawab, dan tanggung gugat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, menentukan indikator keberhasilan, menggali data dan informasi serta berbagi peran dalam setia prosesnya.

c. Prinsip akurasi dan kehati-hatian

Mengingat bahwa data ini akan digunakan terus menerus sebagai alat untuk mengukur pencapaian program, maka data-data yang diperoleh harus akurat dan valid dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun juga secara sosial.

d. Prinsip keberlanjutan

Bahwa data ini harus dapat dipergunakan secara periodik mulai dari data awal, evaluasi maupun juga paksa pelaksanaan program, dan terutama dapat dimanfaatkan untuk pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam peningkatan kualitas permukiman baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Alur Pelaksanaan Kegiatan

Alur Pelaksanaan Kegiatan pendataan 100-0-100 dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. Tahap Pesiapan
- b. Tahap pelaksanaan Pendataan
- c. Tahap Penyusunan Profil Kawasan Permukiman

BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 189.2 / 239 / WAKO / 2014 TANGGAL, 10 SEPTEMBER 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH, TERDAPAT 6 (enam) DESA / KELURAHAN KUMUH SEPERTI DAFTAR TABEL BERIKUT INI :

Tabel 2.3
Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kota Sawahlunto

| N O | DESA / KEL | KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | LUAS AREAL (Ha) | KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN | TINGKAT KEKUMUHAN |
|--------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Muaro | Sawah Taratak | 4,80 | Kuliner Kampung Sate | Kumuh Berat |
| | Kalaban | Sawah Tambang | | Perdagangan | |
| 2 | Lumindai | Pasar Mudik | 5,21 | Perdagangan | Kumuh Berat |
| 3 | Sikalang | Kemiri, Tarandam | 3,29 | Permukiman, Fasum | Kumuh Berat |
| 4 | Lunto Barat | Batu Anyir, Titarajo | 3,11 | Perdagangan, Fasum, Permukiman | Kumuh Sedang |
| 5 | Air Dingin | RT.01 – 02 - 03 | 0,14 | Permukiman Perkotaan | Kumuh Sedang |
| 6 | Kub. Sir Selatan | RT.01 – 02 - 03 | 0,27 | Permukiman Perkotaan | Kumuh Sedang |
| JUMLAH | | | 16,10 | | |

Namun apabila dikaitkan dengan data fisik indikator kumuh perumahan permukiman yang ada, masih banyak kawasan perumahan permukiman perkotaan dan perdesaan yang kumuh terutama pada aspek keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kondisi fisik bangunan, pembuangan air limbah dan pengamanan bahaya kebakaran serta legalitas pendirian bangunan.

Dari indikator kumuh tersebut, kawasan perumahan permukiman kumuh terdapat di Silungkang Tigo, Muaro Kalaban, Lunto Barat, Pasar Kubang, Kubang Sirakuk Selatan, Pasar, aur Mulyo, Air Dingin, Saringan, Durian I, Lumindai, Balai Batu Sandaran, Sikalang dengan total luas diperkirakan

50 Ha. Dari baseline data Program Peningkatan Kualitas Permukiman yang akan disusun, akan terlihat kawasan kumuh eksisting dengan berbagai karakteristik dan tingkat kekumuhannya.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi

2.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2019 di Kota Sawahlunto adalah:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (*kawasan potensial PDAM*);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
4. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;
5. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 2% kebutuhan investasi AMPL Kota Sawahlunto dalam rangka pencapaian target 100-0-100 Universal Access;

2.2.2 Strategi

Strategi dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2015 di Kota Sawahlunto adalah:

1. Mengembangkan dan memperluas jaringan air bersih
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air minum oleh PDAM
4. Meningkatkan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih
5. Meningkatkan kesehatan lingkungan

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019



3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Air Bersih

Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan air bersih yang disusun sampai tahun 2019 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 88,68% menjadi 100% Tahun 2019

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|--|---|--|
| 1 | Mengembangkan dan memperluas jangkauan pelayanan | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2. Pengendalian Kehilangan Air 3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Produksi dan Distribusi |
| 2 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan 2. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat |
| 3 | Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih oleh PDAM | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan 2. Pengendalian Kehilangan Air 3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Produksi dan Distribusi |

Sasaran 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Meningkatkan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih | 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | 1. Fasilitasi dan Stimulan Air Bersih Berbasis Masyarakat 2. Penguatan Kelembagaan BPSPAM 3. Penguatan Kelembagaan Peduli Sanitasi |
| | | 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 1. Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS 2. Pemeliharaan Sumber Air dan Jaringan Perpipaan |

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Meningkatkan kesehatan lingkungan | 1. Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan |
| | | 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat |
| | | 3. Pengembangan Lingkungan Sehat | 1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 2. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat |
| | | 4. Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS) | 1. Monitoring Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan 2. Pelatihan MPA PHAS/CLTS 3. Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Untuk Guru |
| | | 5. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 1. Penyehatan Lingkungan 2. Advokasi Penyediaan Air Minum Berkualitas 3. Pengawasan Kualitas Air Minum Perpipaan 4. Advokasi dan Kampanye STOP BABs 5. Advokasi Pelaksanaan STBM |

B. Sanitasi

Rencana Program dan kegiatan penyediaan pelayanan sanitasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 76,16% menjadi 100%

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|--|---|
| 1 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dasar | 1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1. Peningkatan Kinerja TPA 2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Pembangunan Sampah 3R 4. Pengadaan Sarana Persampahan |
| | | 2. Program Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal | 1. Pembangunan Pengolahan Air Limbah Terpusat 2. Pembangunan Septik Tank Komunal Kawasan 3. Pembangunan Septik Tank Komunal Untuk RSH 4. Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 5. Pembangunan MCK++ |
| | | 3. Program Pembangunan Saluran Drainase | 1. Pembangunan Saluran Drainase Primer Kota 2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Kota 3. Normalisasi Sungai Bt Lunto, Bt Lasi, Bt Sumpahan 4. Penyusunan Master Plan Drainase |

Sasaran 2 : Meningkatkan cakupan penduduk yang menerapkan PHBS

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Meningkatkan kesehatan lingkungan | 1. Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan |
| | | 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat |
| | | 3. Pengembangan Lingkungan Sehat | 1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 2. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 4. Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Sanitasi Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan 2. Pelatihan MPA PHAS/CLTS 3. Pelatihan Hygiene dan Sanitasi untuk Guru |
| | | 5. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan Lingkungan 2. Advokasi Penyediaan Air Minum Berkualitas 3. Pengawasan Kualitas Air Minum Perpipaan 4. Advokasi dan Kampanye STOP BABs 5. Advokasi Pelaksanaan STBM |

C. Kawasan Kumuh

Rencana Program dan kegiatan penyediaan pelayanan sanitasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh Dari 16,10 Ha menjadi 0 Ha

| NO | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|--|---------------------------------------|--|
| 1 | Menciptakan/melakukan keteraturan bangunan | 1. Penataan Bangunan dan Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Bangunan, Gedung dan Fasilitas Umum dan Sosial 2. Penertiban/Penerbitan IMB 3. Penyusunan RTBL Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh dan Rawan Bencana 4. Menyiapkan Lahan Siap Bangun 5. Relokasi Pemukiman Liar 6. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas |
| 2 | Meningkatkan kualitas fisik bangunan | 1. Penyediaan Rumah Bagi MBR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Murah Untuk MBR 2. Pembangunan Rusunawa |
| | | 1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni 2. Penataan Prasarana Lingkungan Kumuh 3. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Penyediaan Hunian Berimbang |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | Meningkatkan kualitas jalan lingkungan | 1. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan | 1. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan 2. Pembuatan RTH Lingkungan 3. Penyusunan Data Base Jalan Lingkungan |
| 4 | Meningkatkan kualitas drainase lingkungan | 1. Peningkatan Kualitas Drainase | 1. Penyusunan Master Plan Drainase 2. Peningkatan Kualitas Drainase Sekunder dan Tersier |
| | | 2. Rehab/Pemeliharaan Drainase | 1. Rehab/Pemeliharaan Drainase 2. Pembuangan Sedimen |
| | | 3. Normalisasi Saluran Drainase Sungai | 1. Normalisasi Saluran Sungai dan Drainase Primer 2. Perkuatan Tebing Sungai Bt. Lasi, Bt. Lunto, Bt. Sumpahan, Bt. Ombilin 3. Pembuatan Kolam Retensi 4. Pembuatan Saluran Limbah Rumah Tangga |
| 5 | Meningkatkan kualitas sarana prasarana air limbah | 1. Pembangunan Sarana Air Limbah | 1. Pembangunan IPAL Komunal Skala Kawasan 2. Pembangunan IPLT 3. Pembuatan Septik Tank Komunal 4. Pembuatan MCK Plus 5. Pengadaan WC Mobile dan Truk Tinja 6. Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 7. Penyusunan Master Plan Air Limbah |
| | | 2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 1. Pemicuan STBM, CLTS, CTPS 2. Pemberdayaan PHBS 3. Bantuan Stimulan Jamban Bagi MBR 4. Pembentukan Kader AMPL Tingkat Desa |
| | | 3. Peningkatan Peran Serta Swasta | 1. Bantuan Program CSR dan Pembinaan Anak Angkat 2. Pengendalian Kualitas Lingkungan Industri |
| 6 | Meningkatkan penyediaan pelayanan air minum | 1. Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air Minum | 1. Optimalisasi Jaringan Perpipaan 2. Perluasan Jangkauan Pelayanan 3. Peningkatan Kapasitas IPA |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Pengurangan Kebocoran 5. Rehab/Pemeliharaan Jaringan Perpipaan 6. Pemanfaatan Idle Capacity 7. Pembangunan SPAM Regional |
| | | 2. Penyediaan Air Berbasis Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan PAMSIMAS III 2. Optimalisasi PAMSIMAS I-II 3. Penyediaan Air Minum Desa Rawan Air 4. Perlindungan Mata Air dan Sumber Air Baku 5. Pembuatan Embung |
| | | 3. Peningkatan Manajemen Aparatur dan Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas SDM PDAM dan Asosiasi BPSPAMS 2. Penyusunan Bisnis Plan PDAM |
| 7 | Meningkatkan pengelolaan persampahan | 1. Peningkatan Pengelolaan Persampahan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan TPS Sementara 2. Pembangunan Sarana 3R 3. Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan 4. Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 5. Peningkatan Operasional TPA Kayu Gadang |
| | | 2. Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kader Sampah 3R 2. Pembentukan Bank Sampah |
| 8 | Meningkatkan pengamanan bahaya kebakaran | 1. Penyusunan Manajemen Proteksi Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 2. Sosialisasi Proteksi Bahaya Kebakaran 3. Pembentukan Kader Tanggap Darurat dan Siaga Bencana 4. Pembuatan Sistem Informasi Bencana |
| | | 2. Pembangunan Sarana Prasarana Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ground Tank Water dan Bak Reservoir 2. Pembangunan Hydran Umum 3. Pengadaan Racun Api dan Becak Motor Pemadam Kebakaran 4. Pembuatan Baliho Peta Rawan Bencana |
| | | 3. Peningkatan SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Petugas Tagana Kebakaran 2. Pengadaan Sarana Perlengkapan Pakaian Tahan |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengurangan Kebocoran 5. Rehab/Pemeliharaan Jaringan Perpipaan 6. Pemanfaatan Idle Capacity 7. Pembangunan SPAM Regional |
| | | 2. Penyediaan Air Berbasis Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan PAMSIMAS III 2. Optimalisasi PAMSIMAS I-II 3. Penyediaan Air Minum Desa Rawan Air 4. Perlindungan Mata Air dan Sumber Air Baku 5. Pembuatan Embung |
| | | 3. Peningkatan Manajemen Aparatur dan Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas SDM PDAM dan Asosiasi BPSPAMS 2. Penyusunan Bisnis Plan PDAM |
| 7 | Meningkatkan pengelolaan persampahan | 1. Peningkatan Pengelolaan Persampahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan TPS Sementara 2. Pembangunan Sarana 3R 3. Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan 4. Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 5. Peningkatan Operasional TPA Kayu Gadang |
| | | 2. Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kader Sampah 3R 2. Pembentukan Bank Sampah |
| 8 | Meningkatkan pengamanan bahaya kebakaran | 1. Penyusunan Manajemen Proteksi Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 2. Sosialisasi Proteksi Bahaya Kebakaran 3. Pembentukan Kader Tanggap Darurat dan Siaga Bencana 4. Pembuatan Sistem Informasi Bencana |
| | | 2. Pembangunan Sarana Prasarana Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ground Tank Water dan Bak Reservoir 2. Pembangunan Hydran Umum 3. Pengadaan Racun Api dan Becak Motor Pemadam Kebakaran 4. Pembuatan Baliho Peta Rawan Bencana |
| | | 3. Peningkatan SDM Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Petugas Tagana Kebakaran 2. Pengadaan Sarana Perlengkapan Pakaian Tahan |

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI



4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target AMPL (Universal Access) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan Percepatan Pencapaian Target Universal Access (100-0-100) Kota Sawahlunto. Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target Universal Access Kota Sawahlunto pada Lembaga Pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target Universal Access. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tersebut juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi dan Media Massa.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target Universal Access Kota Sawahlunto di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Tim Pokja AMPL Kota Sawahlunto maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target Universal Access.

4.2. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah:

- ❖ Untuk memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019
- ❖ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

4.3. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. SKPD melalui Tim Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi Bappeda.
4. Bappeda Kota Sawahlunto melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh SKPD.
6. SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bappeda.
7. Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.

Formulir evaluasi RAD-AMPL Kota Sawahlunto tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

BAB V PENUTUP



5.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 4 (empat) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dalam pengembangan program AMPL.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Access di Kota Sawahlunto.

Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kota Sawahlunto sampai dengan tahun 2015. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kota Sawahlunto menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2015-2019.

Tabel 4.1
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
Tahun 2015-2019

Tahun 2015-2019

| NO | KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR / OUTPUT | CAPAIAN | | TARGET CAPAIAN | | | | | ANGGARAN (Rp. 000.000,-) | | | | | SUMBER PENDANAAN | PELAKSANA | KETERANGAN |
|--|--|--|---------|-------|----------------|-------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|-----------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator MDGs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan pedesaan) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A AIR MINUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Peningkatan Cakupan Pelayanan | 1. % Cakupan Pelayanan Jumlah SR | 53,12 | 58,20 | 65,88 | 74,30 | 75,90 | 80,20 | 508 | 768 | 842 | 160 | 430 | APBN, DAK | PDAM | | |
| | | | 5,196 | 5,312 | 7,012 | 8,585 | 10,058 | 11,531 | | | | | | APBD II | | | |
| | | 2. % Daerah Pelayanan | 52,15 | 56,50 | 63,50 | 68,50 | 75,64 | 82,18 | | | | | | APBN, DAK | PDAM | | |
| 1.2 | Pengendalian Kehilangan Air | 1. % Tingkat Kehilangan Air Pemanfaatan NRW L/det | 37,00 | 34,00 | 29,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 2.200 | 1.206 | 1.206 | 1.000 | 800 | APBD II | | | |
| | | 2. Jumlah penggantian/peneraan Water Meter Induk dan pelanggan | | 2,2 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 1.000 | 1.000 | 500 | 750 | APBN, DAK | PDAM | | |
| 1.3 | Optimalisasi Sarana dan prasarana produksi dan distribusi. | 1. % Kapasitas yang belum dimanfaatkan | | 50,05 | 43,52 | 28,29 | 24,60 | 21,39 | | 1.360 | 3.046 | 7.380 | 6.420 | APBN, DAK | PDAM | | |
| | | 2. Optimalisasi Distribusi | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 180 | | | | | | APBD II | PDAM | | |
| 1.4 | Peningkatan Jumlah Pelanggan | 1. % Pertumbuhan Pelanggan per tahun | | 5,08 | 7,68 | 8,42 | 1,60 | 4,30 | 600 | 2.319 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | APBN, DAK | PDAM | | |
| | | 2. Jumlah Penyambungan baru | | 400 | 1.546 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | | | | | | APBN, DAK | PDAM | | |
| B AIR LIMBAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Peningkatan Kinerja IPLT | 1 Meningkatkan pengelolaan di IPLT | | | | | | 1 | | | | 2500 | | APBN | BLH | | |
| 1.5.1 | Peningkatan kapasitas IPLT | | | | | | 1 | | | | 400 | | | APBD Prov | BLH | | |
| 1.5.2 | Pengadaan Truk Tinja | | | | | | 2 | | | | 200 | | | Swasta | BLH | | |
| 1.5.3 | Pengadaan Motor Lumpur Septic | 2 Meningkatkan cakupan layanan air limbah | | | | | 1 | 1 | | | 800 | | 800 | APBN - Swasta | BLH | | |
| 1.5.4 | Pengadaan WC Keiling | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bab V Penutup 5 - 3

| NO | KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR / OUTPUT | CAPAIAN | | TARGET CAPAIAN | | | | | | | ANGGARAN (Rp. 000.000,-) | | | | | | | SUMBER PENDANAAN | PELAKSANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---------|------|----------------|------|------|------|------|------|--------|--------------------------|--------|--------|------------------|---------|------|------|------------------|-----------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| C PERSAMPAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6.1 | Penyusunan Masterplan Persampahan Kota | | | | 1 | | | | | | | | | APBD | Bappeda | | | | | |
| | 1.6.2 | Pembangunan 3R skala kawasan | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 400 | 400 | APBN | DPU | | | | | |
| | 1.6.3 | Pengadaan Bulldozer | | | | 1 | | | | | | | | 2.000 | APBN | BLH/DPU | | | | | |
| | 1.6.4 | Pengadaan Excavator | | | | 1 | | | | | | | | 1.500 | APBN | BLH/DPU | | | | | |
| | 1.6.5 | Pengadaan Amroltruck | | | | | 1 | | | | | | | 800 | APBN | BLH/DPU | | | | | |
| | 1.6.6 | Pengadaan Truck Sampah | | | | | | 2 | | | | | | 800 | APBD Prov | BLH/DPU | | | | | |
| 2 Program Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Pembangunan Pengolahan Air Limbah Terpusat | | | | | | | 1 | | | | | | 20.000 | APBN | DPU | | | | |
| | 2.2 | Pembangunan Septik Tank Komunal Kawasan | | | | 10 | 10 | 10 | | | | 500 | 500 | | APBN | DPU | | | | | |
| | 2.3 | Pembangunan Septik Tank Komunal Untuk RSH | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 2.500 | 2.500 | | APBN | DPU | | | | | |
| | 2.4 | Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin | | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | 1.500 | 1.500 | | | APBD | Dinkes | | | | | |
| | 2.5 | Pembangunan MCK++ | | | | | 2 | 3 | 3 | | | 600 | 900 | | APBN | DPU | | | | | |
| 3 Program Pembangunan Saluran Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Pembangunan Saluran Drainase Primer Kota | | | 12 | 10 | 8 | 10 | | | 31.800 | 26.500 | 21.200 | 26.500 | APBN, DAK | DPU | | | | | |
| | 3.2 | Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Kota | | | 12 | 15 | 16 | 10 | | | 15.000 | 18.750 | 20.000 | 12.500 | APBD Prov | DPU | | | | | |
| | 3.3 | Normalisasi Sungai Bt Lunto, Bt Lasi, Bt Sumpahan | | | 100 | 850 | 750 | 600 | | | 1.000 | 8.500 | 7.500 | 6.000 | APBN - APBD Prov | DPU | | | | | |

| NO | KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR / OUTPUT | CAPAIAN | | TARGET CAPAIAN | | | | | ANGGARAN (Rp. 000.000.-) | | | | | SUMBER PENDANAAN | PELAKSANA | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 4 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan | Terselenggaranya pembangunan Jaringan Air Bersih (lokasi) | | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1.400 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | APBD | BAP-DPU | | |
| 5 | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat | Proporsi rumah tangga/keluarga yang menggunakan air bersih | 21 | 29 | 39 | | | | 2.200 | 2.750 | | | | APBN/APBD | DPU | | |
| | | a. Pamsimas (lokasi) | | 2 | 2 | 2 | | | 470 | 470 | 470 | | | APBD | DPU | | |
| | | b. Pamsimas replika (lokasi) | | | | | 43 | | | | 100 | 100 | | APBD | Bappeda/ Kantor PM | | |
| 5.2 | Penguatan Kelembagaan BPSPAM | Tindak lanjut kelembagaan BPS program Pamsimas (lokasi) | | | | 41 | | | | | | | | APBD | Kantor PM/ PKK | | |
| 5.3 | Penguatan kelembagaan peduli sanitasi | Tersedianya lembaga peduli sanitasi di tingkat desa/ke | | | 7 | 10 | 10 | 10 | | 50 | 75 | 75 | | APBD | Kantor PM/ PKK | | |
| 6 | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Penyehatan Lingkungan | Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air berkualitas | 55,14 | 63,15 | 69,15 | 76,25 | 80,15 | 85,25 | | | | | | APBN/APBD | Dinkes | | |
| | | Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat | 66,73 | 69,15 | 73,25 | 76,68 | 80,15 | 85,15 | | | | | | APBD | Dinkes | | |
| | | Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | | 30 | 30 | 170 | 80 | | APBN/APBD | Dinkes | | |
| | | Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat | 42,86 | 51,19 | 60,05 | 68,15 | 77,12 | 85,25 | | | | | | APBN/APBD | Dinkes | | |
| 6.2 | Advokasi penyediaan air minum berkualitas | Jumlah desa yang diadvokasi | 12 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | APBN/APBD | Dinkes | | |
| 6.3 | Pengawasan kualitas air minum perpipaan | Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | APBN/APBD | Dinkes | | |
| 6.4 | Advokasi dan kampanye STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) | Jumlah desa yang mendeklarasikan STOP BABS | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | 37 | 25 | 45 | 75 | 100 | 100 | APBN/APBD | Dinkes | | |
| 6.5 | Advokasi pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | 37 | 25 | 45 | 75 | 100 | 100 | APBN/APBD | Dinkes | | |

Bab V Penutup5

| NO | KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR / OUTPUT | CAPAIAN | | TARGET CAPAIAN | | | | | ANGGARAN (Rp. 000.000,-) | | | | | SUMBER PENDANAAN | PELAKSANA | KETERA-NGAN |
|---|---|---|---------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|------|------|------------------|-----------|-------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | Jumlah kegiatan sosialisasi tentang lingkungan sehat/PHBS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | APBD | Dinkes | | |
| 7.2 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Persentase penduduk menggunakan jamban sehat (%) | 66,73 | 69,15 | 73,25 | 76,68 | 80,15 | 85,15 | | | | | | APBD | Dinkes | | |
| | | Terbentuk Forum Kota Sehat | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 50 | 75 | 75 | 100 | APBD | Dinkes | | |
| 8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | Jumlah sampel air yang diperiksa | 14 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | APBD | Dinkes | | |
| 9 Program Sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PAMSIMAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Monitoring sanitasi air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan | Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas | 21 | 29 | 39 | 41 | 43 | | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | APBD | Dinkes | | |
| 9.2 | Pelatihan MPA PHAS/CLTS | Jumlah pelatihan CLTS dilaksanakan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | APBD | Dinkes | | |
| 9.3 | Pelatihan Hygiene dan sanitasi untuk guru | Jumlah pelatihan HS guru | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | APBD | Dinkes | | |
| 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | Jumlah pesan PHBS ke masyarakat melalui spanduk, stiker, dll | | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | APBD | Dinkes | | |
| 9.2 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan | 16 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | APBD | Dinkes | | |
| 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS | Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya | 21 | 29 | 39 | 41 | 43 | 43 | | 65 | 125 | 150 | 150 | APBD | Kantor PM | | |

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF